

# MENINGKATKAN NILAI AKUNTABILITAS MELALUI PEMBANGUNAN DAERAH TEMATIK

Yoki Tulus Sabtian<sup>1</sup>, Akil Fitra Sholakodin<sup>2</sup>, Durratun Nashihah<sup>3</sup>

Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

E-mail: akilfitra.kat13a@gmail.com

**Abstrak:** Reformasi birokrasi memuat area perubahan manajemen SDM aparatur yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi efektif dan efisien. Peneliti akan mengulas secara mendalam terkait mekanisme dan hasil kinerja pemerintah daerah Kabupaten Ngawi dalam melakukan siasat pembangunan ketika sebelum dan saat pandemi, dan capaian kinerja pasca masa pemulihan ekonomi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada upaya peningkatan nilai SAKIP daerah melalui pembangunan daerah tematik. Pembangunan daerah tematik disesuaikan dengan potensi daerah dan program unggulan daerah, dimana kabupaten ngawi fokus pada potensi daerah yaitu pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan siasat pembangunan sebelum dan saat pandemi, capaian kinerja pasca masa pemulihan ekonomi daerah, dilihat dari tiga sektor yaitu Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian, dengan hasil pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pencapaian yang fluktuatif.

**Kata kunci:** Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Daerah, Manajemen Kinerja

*Abstract: Bureaucratic reform contains areas of change in the management of the human resources of the apparatus itself, which aims to create an effective and efficient bureaucracy. Researchers will review in depth the mechanisms and results of the performance of the Ngawi district government in carrying out development tactics before and during the pandemic, and performance achievements after the regional economic recovery period. This study uses a qualitative approach that focuses on efforts to increase the value of regional SAKIP through thematic regional development. Thematic regional development is adjusted to regional potential and regional superior programs, where Ngawi Regency focuses on regional potential, namely agriculture, trade, and industry. The results of the study indicate that in carrying out development tactics before and during the pandemic, and the achievement of performance after the regional economic recovery period, which is seen from three sectors namely Agriculture, Trade, and Industry, it was found in the last 5 (five) years experienced fluctuating performance.*

**Keywords:** Bureaucratic Reform, Regional Accountability, Performance Management

## PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi mendapatkan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan di negara berkembang (Pratama, 2017). Reformasi birokrasi di Indonesia menjadi bagian penting dan masuk dalam rencana strategis pembangunan, baik di strata nasional maupun di daerah (Krisnajaya, Dewi, & Sulistiyani, 2019). Pemerintah Daerah menjadi tulang punggung pembangunan reformasi birokrasi pasca reformasi tahun 1998 yang berhasil dilakukan (Radiansyah, 2020). Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan identitas daerah, agar pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi dan mampu meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja (Thoha, 2014).

Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sebagai strategi perubahan yang sistematis, terukur dan terencana untuk menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, kredibel dan akuntabel (Dwiyanto, 2020).

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program utama pemerintah dan salah satu dari tiga tujuan reformasi birokrasi. Selain itu, akuntabilitas kinerja merupakan salah satu sub-indikator utama tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, dimana pada tahun 2019 pemerintah menargetkan 50% Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tingkat akuntabilitas yang baik.

Salah satu tantangan dalam memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah menerapkan

sistem penganggaran berbasis kinerja yang dikatakan dapat mengatasi kurangnya interpretasi kinerja dalam mencapai tujuan (Wardani & Silvia, 2021). Pemerintah berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dimana anggaran digunakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Penelitian Anggraeni (2020), anggaran berbasis kinerja terbukti berdampak positif terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah. Disisi lain, menurut penelitian Surya (2017), penganggaran berbasis kinerja berdampak negatif terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan terkait anggaran (Rere & Retnani, 2018). Dalam pemenuhannya, laporan akuntansi yang dihasilkan merupakan kewajiban kepada pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik (Razi & Azhar, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Hafiz et.al (2017), dalam penelitian Setyawan et.al (2017), membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh Lumenta et al (2016), menunjukkan hasil yang berbanding terbalik, karena ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Demi efektifnya Reformasi Birokrasi, maka pemerintah harus menetapkan sebuah model perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi yang diwujudkan dalam bentuk sebuah dokumen perencanaan dengan bahasa yang dapat dipahami sekaligus dilaksanakan oleh seluruh pihak maupun *stakeholder* yang

berkepentingan. Reformasi birokrasi memuat area perubahan manajemen SDM aparatur sendiri bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien. Penerapan manajemen sumber daya manusia yang lebih baik diharapkan dapat menciptakan aparatur sipil negara yang profesional. Kepes dan Delery menjelaskan bahwa pembahasan tentang manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan Pengembangan SDM.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi oleh institusi pemerintahan, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi mengeluarkan Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Upaya reformasi birokrasi tersebut sebagai strategi *refocusing* pembangunan nasional, yang kemudian dapat dilanjutkan oleh pemerintah daerah melalui delapan area perubahan. Delapan area perubahan tersebut meliputi manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan organisasi, penataan tatalaksana, penataan SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penelitian ini menganalisis strategi dan mekanisme Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebelum dan pasca *refocusing* yang diinstruksikan KemenpanRB. Dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mengalami hambatan yang cukup besar, terkhusus saat pandemi Covid-19. Namun upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam memaksimalkan pembangunan daerah melalui strategi tematik mampu meningkatkan nilai akuntabilitas. Strategi tematik tersebut terletak pada pembangunan potensi daerah dan program strategis daerah. Peneliti akan mengulas secara mendalam terkait

mekanisme dan hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam melakukan siasat pembangunan ketika sebelum dan saat pandemi, dan capaian kinerja pasca masa pemulihan ekonomi daerah.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha menemukan dan menganalisis apa yang tersembunyi di balik suatu fenomena atau gejala sosial (Strauss & Corbin, 1997). Penelitian ini fokus pada upaya peningkatan nilai SAKIP daerah melalui pembangunan daerah tematik. Pembangunan daerah tematik disesuaikan dengan potensi daerah dan program unggulan daerah, dimana Kabupaten Ngawi fokus pada potensi daerah yaitu pertanian, perdagangan, dan perindustrian. Sedangkan pada program unggulan daerah berada di sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan pengentasan kemiskinan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 metode yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara dan observasi dilakukan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), sedangkan dokumentasi dilakukan melalui studi literatur dokumen, buku dan artikel ilmiah (Silalahi, 2012). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif berdasarkan pada upaya peningkatan nilai SAKIP daerah melalui pembangunan daerah tematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sebuah instrumen yang digunakan instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan kinerja institusi (Raba, 2020). Tujuan diterapkannya SAKIP adalah agar

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat dijalankan secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya praktik-praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme). Singkatnya, SAKIP dapat dianggap sebagai salah satu instrumen yang digunakan demi terwujudnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* (Ilmar, 2020). Jika merujuk pada Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015, secara umum, terdapat 4 (empat) tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP. Keempat tujuan tersebut antara lain untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Berdasarkan PermenpanRB No.12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP, terdapat 3 (tiga) substansi pokok dalam evaluasi SAKIP, yaitu evaluasi 5 (lima) komponen SAKIP, metode evaluasi, dan penilaian LAKIP (Zakaria, 2017). Kelima komponen SAKIP meliputi perencanaan kinerja; pengukuran kinerja; pelaporan kinerja; evaluasi kinerja; dan capaian kinerja, di mana tiap komponennya terdiri atas beberapa sub komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori AA (sangat memuaskan); A (memuaskan); BB (sangat baik); B (baik); CC (cukup); C (kurang); dan D (sangat kurang).

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan nilai SAKIP dari CC menuju A melalui peningkatan kinerja OPD dalam kurun waktu selama 2 tahun. Upaya peningkatan kinerja tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

mengusung program unggulan di sektor pertanian, UMKM dan industri. Strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi membentuk sebuah model manajemen perangkat daerah (PD). Terdapat efektifitas kinerja yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi yang menyebabkan terjadinya peningkatan nilai SAKIP tersebut. Model manajemen perangkat daerah ini dikembangkan sesuai dengan potensi, kebutuhan dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan potensi, pemerintah dapat membuat model manajemen yang sesuai dengan kepentingan pembangunan daerah.

### **Capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi**

Seiring dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) maka setiap instansi pemerintah dalam kaitannya dengan hal ini adalah Pemerintah Daerah diharuskan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bahan pertanggungjawaban kerjanya dan menjadi awal mula reformasi administrasi di Indonesia. SAKIP yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden tersebut cenderung mengukur *input*, proses dan output dalam pengukuran kerjanya daripada berfokus pada hasil (Cole & Parston, 2006). Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa kurang fokusnya pemerintah terhadap hasil menyebabkan pengukuran kinerja seringkali tidak berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu pentingnya pengukuran kinerja sektor publik menjadi faktor penting dalam memperbaiki kinerja pemerintah.

Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam pelaksanaannya mengacu pada PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja SAKIP secara keseluruhan belum dapat menjelaskan sebab akibatnya atau dengan kata lain merupakan penjelasan asumsi yang dibuat (Firmansyah, 2010). Sementara itu Cole dan Parston (2006), memaparkan bahwa pengukuran kinerja yang banyak dilakukan di sektor publik terlalu fokus terhadap sisi internal, sehingga sisi eksternal belum diperhatikan dengan betul seperti kebutuhan *stakeholders* ataupun warga. Hal ini dapat dilihat dari temuan mengenai sebelum samanya standar penilaian antar instansi serta proses pengumpulan data yang kurang baik. Pernyataan tersebut diafirmasi oleh Pollit & Bouckaert (2004) bahwasanya kinerja organisasi bergantung pada kemampuan untuk menciptakan ukuran kinerja yang baik, sehingga pengukuran kinerja menjadi jembatan efektif dalam memenuhi kebutuhan publik.

Kabupaten Ngawi selama kurun waktu 2017 hingga 2019, telah mendapatkan predikat baik dalam pelaksanaan SAKIP oleh Kementerian PANRB. Dari data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP, bahwa Kabupaten Ngawi mendapatkan nilai SAKIP A. Perolehan nilai ini diperoleh Kabupaten Ngawi sejak tahun 2018 hingga tahun 2019. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Ngawi telah secara matang dan ideal menerapkan konsep manajemen kinerja dengan baik. Lebih lanjut, penilaian SAKIP dilakukan pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Dari data yang ada, salah satu perolehan nilai SAKIP yang besar berada pada aspek pengukuran kinerja. Berikut ini adalah hasil penilaian SAKIP Pemkab Ngawi dari Kementerian PANRB:

**Tabel 1. Nilai LHE AKIP Kab Ngawi 2015-2019**

Komponen	Bobot Penilaian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
Perencanaan Kinerja	30%	8,58	17,99	23,69	25,89	26,24
Pengukuran Kinerja	25%	9,29	8,9	18,23	21,19	21,16
Pelaporan Kinerja	15%	10,03	10,03	10,37	12,42	12,21
Evaluasi Kinerja	10%	5,29	4,69	6,36	7,83	8,31
Capaian Kinerja	20%	10,19	10,19	11,38	12,69	12,63
<b>Nilai</b>		<b>CC</b>	<b>CC</b>	<b>BB</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Sumber: Kementerian PANRB, 2019

**Tabel 2. Pertumbuhan Nilai SAKIP Kab Ngawi 2015-2019**

Komponen	Bobot Nilai	Pertumbuhan			
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
Perencanaan Kinerja	30%	-3,17%	31,60%	9,28%	1,35%
Pengukuran Kinerja	25%	104,8%	104,8%	16,20%	-0,14%
Pelaporan Kinerja	15%	0,00%	3,38%	19,76%	-1,69%
Evaluasi Kinerja	10%	-11,34%	35,60%	23,11%	6,13%
Capaian Kinerja	20%	0,00%	11,67%	11,51%	-0,47%

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan data diatas maka pertumbuhan komponen pengukuran kinerja diatas dari tahun 2015 hingga 2019 meningkat rata-rata 8,03%. Dari upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten ngawi tersebut memberikan dampak terhadap peningkatan progresifitas peningkatan

nilai SAKIP yang signifikan dan cepat yang memberikan bukti bahwa merit sistem dapat dibentuk melalui kinerja ASN daerah. Pencapaian kinerja tersebut didukung oleh peningkatan yang signifikan pada IKU RPJMD Kabupaten Ngawi Periode 2016-2021. Berikut ini merupakan capaian IKU RPJMD Ngawi periode 2016-2021:

**Tabel 3. Capaian IKU RPJMD Kabupaten Ngawi Periode 2016-2021**

12 Indikator Kinerja Utama	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk Miskin	Persen	14,91	14,83	14,39	15,44
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,76	3,83	3,7	3,98
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	69,27	69,91	70,41	70,81
Cakupan layanan infrastruktur	Persen	70,5	72,80	74,76	N/A
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	84,08	62,51	66,44	N/A
Angka Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,22	5,26	5,05	-1,69
PDRB Perkapita (ADHB)	Persen	21,46	19,14	20,43	20,27
Indeks Reformasi Birokrasi	Persen	71,15	62,34	66,06	N/A
Indeks Pembangunan Desa	Persen	NA	67,97	68,31	N/A
Indeks Pembangunan Gender	Persen	92,16,00	91,72	91,83	91,92
Angka Konflik	Persen	0	0	0	0
Angka kriminalitas	Persen	NA	5,2	3,1	N/A

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

Data diatas menjelaskan kondisi capaian indikator kinerja berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi

Tahun 2016–2020 bahwa terdapat 2 indikator kinerja yang memperoleh capaian yang tidak baik secara

signifikan, yakni indikator persentase penduduk miskin dan angka pertumbuhan ekonomi. Capaian data yang diperoleh bersifat fluktuatif yang artinya bahwa realisasi kinerja tersebut tidak tercapai kinerjanya karena kualitas pengukuran kinerja yang telah ada tidak terukur dan tidak berkualitas. Jika dianalisis berdasarkan pendapat ahli secara teoritis dikemukakan bahwa sistem pengukuran kinerja yang baik berdampak positif terhadap capaian kinerja organisasi atau pengukuran kinerja berbanding lurus dengan capaian kinerja.

### **Model Reformasi Birokrasi Kabupaten Ngawi dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Program Tematik**

Dalam peningkatan nilai SAKIP, upaya reformasi birokrasi yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi fokus pada peningkatan program unggulan meliputi pertanian, perdagangan dan perindustrian. Dengan demikian, siasat yang ditempuh adalah melaksanakan pembangunan tematik sesuai dengan potensi unggulan daerah. Selain itu, sinergitas dan komitmen penuh oleh dinas terkait menjadikan program unggulan daerah mampu membawa reformasi birokrasi semakin baik melalui peningkatan nilai akuntabilitas kinerja daerah.

### **Reformasi Birokrasi Sektor Pertanian**

Reformasi secara umum bermakna membuat sesuatu menjadi lebih baik dengan cara melakukan pembenahan sistem. Pada sektor pertanian pembenahan dapat dilakukan dengan cara membangun pertanian modern dengan sistem agribisnis (pascapanen). Hal inilah yang dilakukan oleh Kabupaten Ngawi pada sektor pertanian

dengan mengusung visi “Agropolitan” dengan tujuan mengembangkan pusat-pusat berbasis pertanian yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kawasan komoditi unggulan pertanian, yang didukung oleh berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pendukung utama sistem agribisnis pertanian di Kabupaten Ngawi.

Sektor pertanian merupakan kategori sektor unggulan yang berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonomi dan berpengaruh pada kebutuhan pangan. Dalam peningkatan ekonomi di sektor pertanian, irigasi menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jaringan irigasi dalam kondisi baik mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi peningkatan jaringan irigasi tidak meningkat secara signifikan. Sehingga, diperlukan perbaikan jaringan irigasi agar meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Selain itu, jumlah desa rawan pangan di Kabupaten Ngawi termasuk tinggi yaitu mencapai 23 desa di Tahun 2020. Hal tersebut dipengaruhi Intervensi hanya pada bahan pangan, dan belum pada tahap pemberdayaan serta lembaga yang kurang kooperatif. Sehingga diperlukan optimalisasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan lumbung pangan desa.

Maka, jika ditarik kesimpulan persentase Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB harga di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Ketercapaian tersebut dipengaruhi oleh Kontribusi pada sektor usaha jasa yang meningkat dan ketersediaan air yang kurang. Hasil Kinerja Kabupaten Ngawi di sektor pertanian dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. Hasil Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Ngawi**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021 TW 1
Produktivitas Padi	6,12	6,14	6,34	6,33	6,35	6,2
Luas Lahan Sawah	50197	50197	50197	50197	50197	50715
Produktivitas Jagung	7,91	7,94	9,46	7,31	7,26	7,5
Persentase Capaian Produksi	115,81	113,57	114,47	110,85	104,27	-
Nilai Tukar Petani (NTP)	84,30	91,30	92,08	NA	NA	-
Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya	1.154.933	1.169.084	1.174.074	1.145.188	1.171.599	318.593
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6,12	6,14	6,34	6,33	6,35	6,2
Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB	39,01	36,1	35,38	34,4	35,33	-
Jumlah kontribusi PDRB konstan dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.047.684	3.945.033	4.046.368,86	4.117.317,30	4.156.112,5	-
Jumlah kontribusi PDRB harga berlaku dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.448.348	6.393.147	6.772.530,10	7.028.550,90	7.162.435,1	-
Cakupan Bina Kelompok Tani	6,8	16,1	24,22	36,13	41,62	-

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, 2021

### Reformasi Birokrasi Sektor Perdagangan

Perdagangan merupakan unsur dalam pelaksanaan dalam mendukung urusan pemerintah untuk peningkatan ekonomi di sektor perdagangan. Bidang perdagangan akan selalu menghadapi tantangan peningkatan dalam mendongkrak peningkatan ekonomi

dengan melihat potensi daerah Kabupaten Ngawi. Dalam meningkatkan potensi dalam ekspor daerah untuk mendukung Potensi Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi didukung dengan dinas untuk meningkatkan ekspor. Nilai ekspor Kabupaten Ngawi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pencapaian yang

**Tabel 5. Hasil Kinerja Sektor Pertanian Kabupaten Ngawi**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai ekspor daerah	19.180.000.000	19.180.000.000	19.036.000.000	312.34.458.310	323.014.323.355
Persentase Pertumbuhan ekspor	0	0	0	1,541	3,415
Jumlah pendaftaran perusahaan	10	25	591	1.479	4.541
Persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan	0	0	0	1,541	3,415
Kegiatan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	4	8	-	20	35
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	15,49	16,05	16,45	16,71	16,23
Nilai PDRB Sektor Perdagangan	2034486,1	2199468,8	2336022,4	2487361,1	2367554,7

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, 2021

fluktuatif. Peningkatan disebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru serta adanya pameran yang menampilkan potensi ngawi sebagai tempat yang ramah berinvestasi. Jumlah pendaftaran perusahaan di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan mudahnya proses perizinan dalam mendaftarkan perusahaan. Selain itu, indikator persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan juga meningkat di tahun 2019-2020. Hasil Kinerja Kabupaten Ngawi di sektor pertanian

dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

### **Reformasi Birokrasi Sektor Perindustrian**

Perindustrian merupakan unsur dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang peningkatan ekonomi. Bidang perindustrian akan selalu menghadapi tantangan yang kompleks peningkatan ekonomi untuk mendongkrak sektor industri dengan melihat potensi daerah Kabupaten Ngawi.

**Tabel 6. Potensi Kabupaten Ngawi**

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah industri baru	80	97	95	97	85
Persentase Pertumbuhan Industri	0,48	0,48	0,56	0,56	0,59
Jumlah IKM yang mengalami peningkatan status	26	55	14	17	29
Jumlah IKM yang melakukan inovasi produk	6	25	24	24	32
Persentase kerjasama produksi antar IKM yang telah dibina	0,14	0,15	0,15	0,15	0,22
Cakupan bina kelompok pengrajin	6	20	16	4	13
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	5,13	7,3	7,1	5,9	-4,7
Nilai PDRB Sektor Industri	992.044,40	1.064.497,30	1.140.074,30	1.207.330,30	1.150.540,3
Pertumbuhan industri	0,48	0,48	0,56	0,56	0,59

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, 2021

Jumlah industri baru di Kabupaten Ngawi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pencapaian yang fluktuatif. Peningkatan jumlah industri baru di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh banyaknya produk olahan makanan inovatif. Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Ngawi pada 5 tahun terakhir yakni tahun 2016-2020, mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Ngawi tahun 2016 persentase pertumbuhan industri mencapai 0,48% dan stagnan di tahun 2017, dan persentase pertumbuhan industri tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,56%. Kemudian, meningkat kembali pada tahun 2020 menjadi 0,59%.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah peneliti lakukan terhadap strategi dan mekanisme pemerintah daerah kabupaten ngawi dalam melaksanakan reformasi birokrasi, sebelum dan pasca refocusing yang diinstruksikan kemenpan RB. Dalam melaksanakan kinerja pemerintahan, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi mengalami hambatan yang cukup besar, terkhusus saat pandemi Covid-19. Setelah mengulas secara mendalam terkait mekanisme dan hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam melakukan siasat pembangunan ketika sebelum dan saat pandemi, dan capaian kinerja pasca masa pemulihan ekonomi daerah, yang dilihat dari tiga sektor yaitu Pertanian, Perdagangan, dan Perindustrian ditemukan hasil bahwa pada ketiga sektor tersebut pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pencapaian yang fluktuatif.

Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB harga di Kabupaten Ngawi pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Ketercapaian tersebut

dipengaruhi oleh kontribusi pada sektor usaha jasa yang meningkat dan ketersediaan air yang kurang.

Pada sektor perdagangan mengalami pencapaian yang fluktuatif. Peningkatan disebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru serta adanya pameran yang menampilkan potensi ngawi sebagai tempat yang ramah berinvestasi. Jumlah pendaftaran perusahaan di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan mudahnya proses perizinan dalam mendaftarkan perusahaan. Selain itu, indikator persentase peningkatan nilai ekspor perdagangan juga meningkat di tahun 2019-2020.

Jumlah industri baru di Kabupaten Ngawi pada 5 (lima) tahun terakhir mengalami pencapaian yang fluktuatif. Peningkatan jumlah industri baru di Kabupaten Ngawi dipengaruhi oleh banyaknya produk olahan makanan inovatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, F. (2020). "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*. 1(1), 36–44.
- Cole, M. and Parston, G. (2006). *Unlocking Public Value: New Model for Achieving High Performance in Public Service Organization*. Wiley & Sons, Inc., Hoboken.
- Dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026.
- Firmansyah, D. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar. *Economics Bosowa Journal Edisi Xxiv Januari*

- s/d Maret 2018*, 4(001), 165–177.
- Hafiz, M., Rasuli, M., & Kurnia, P. (2017). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar)." *JOM Fekon*, 4(1), 528–542.
- Krisnajaya, I. M., Suropto, Dewi, N. P., Sulistiyani, A. T., & Laksana, L. U. A. (2019). The Political Process of Bureaucratic Reform: Wonosobo Regional Government Experience from 2011-2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 23(2), 135–149. <https://doi.org/10.22146/JSP.42589>
- Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). "Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)." *Jurnal EMBA*, 4(3), 135–146.
- Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3), 88. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519>
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMM Press.
- Radiansyah, R. R. (2020). Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Mewujudkan Good Governance Melalui Kerangka Otonomi Daerah. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 80. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6387>
- Razi, R. F., Savitri, E., & Azhar, A. (2017). "Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah)." *JOM Fekon*, 4(1), 294–308.
- Rere, Y. D., & Retnani, E. D. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 16.
- Silalahi, U. (2012). *Asas-Asas Manajemen*. Refika Aditama.
- Surya, L. (2017). "Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu." Rokan Hulu: Universitas Pasir Pengairan.
- Setyawan, H., Rusli, A., & Hariyani, E. (2017). "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating." *JOM Fekon*, 4(1).
- Thoha, M. (2014). *Kepemimpinan dan Manajemen*. Pevisi Buku Perguruan.
- Wardani, N. D., & Silvia, D. (2021). "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Lampung." *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 6(1). 6(1), 47–56.